

POLA KOMUNIKASI PEMANGKU JABATAN KERATON KASEPUHAN DENGAN PEJABAT PEMERINTAH KOTA CIREBON

Ahmad Fajar Nugraha
(Email: fajarnugrahad@gmail.com)

Fatmawati Fatmawati
(Email: fatmawati@uinjkt.ac.id)

Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract

This study aims to determine how the pattern of communication between Kasepuhan Palace officials and City Government officials. This research method uses a qualitative approach. The theory used is symbolic interactionism that was coined by George Herbert Mead. Then this study also uses the concept of formal and informal communication patterns initiated by Khomsahrial Romli. In addition, the concept of communication patterns is also used according to H.A.W. Widjaya in his book Introduction to Communication Studies. There are four communication patterns namely wheel pattern, chain pattern, circle pattern and star pattern. The results of this study, namely the communication patterns used by Kasepuhan Palace officials and City Government officials are communication patterns oriented towards communicator equality, such as star patterns and horizontal patterns. Star patterns and horizontal patterns allow each communicator to exchange messages and respond directly without regard to social status or things that can distinguish the rights of communicators in speaking.

Keywords: Acting, Official, Cirebon, Palace

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi Pejabat Keraton Kasepuhan dengan pejabat Pemkot. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan adalah interaksionisme simbolik yang dicetuskan oleh George Herbert Mead. Penelitian ini menggunakan konsep pola komunikasi formal dan informal yang digagas oleh Khomsahrial Romli. Selain itu, digunakan pula konsep pola komunikasi menurut H.A.W. Widjaya dalam bukunya Ilmu Komunikasi Pengantar Studi. Terdapat empat pola komunikasi, sebagai berikut: pola roda, pola rantai, pola lingkaran dan pola bintang. Hasil dari penelitian ini, menemukan pola komunikasi yang digunakan oleh Pejabat Keraton Kasepuhan dan pejabat Pemkot adalah pola-pola komunikasi yang berorientasi pada kesetaraan komunikator, seperti pola bintang dan pola horizontal. Pola bintang dan pola horizontal memungkinkan setiap komunikator untuk saling bertukar pesan dan respon secara langsung, tanpa memandang status sosial ataupun hal-hal yang dapat membedakan hak-hak komunikator dalam berbicara.

Kata Kunci: Pemangku, Pejabat, Cirebon, Keraton

A. Pendahuluan

Kota yang unik dan mempunyai sejarah peradaban manusia banyak terdapat di hampir seluruh negara di dunia,¹ salah satu kota di Indonesia yang unik dan bersejarah, serta berpotensi sebagai lanskap budaya adalah wilayah yang berada dibawah pengaruh Kraton Cirebon (Kraton Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan, dan Kaprabonan).² Wilayah ini dikenal dengan sebutan Cirebon atau Ciayumajakuning, merupakan eks-Karesiden Cirebon (abad ke-19),³ tepatnya daerah kekuasaan kerajaan Padjajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi.⁴ Pemimpinnya bernama Lebe Uca sebagai vasal Pate Rodim, Raja Demak.⁵ Pada masa ini Cirebon dikenal sebagai pelabuhan yang memiliki peranan penting bagi kerajaan Padjajaran.⁶ Hal ini dibuktikan dengan banyaknya muara sungai yang berada di Cirebon sehingga memudahkan dalam aktifitas transportasi dan perdagangan.⁷

Kraton yang merupakan pecahan dari Kerajaan Cirebon yang didirikan oleh Raden Walangsungsang, anak dari Prabu Siliwangi pada abad ke-15. Pada awal berdirinya, Kerajaan ini berada di Muarajati, Kabupaten Cirebon saat ini. Selanjutnya, pusat kerajaan dipindahkan ke wilayah Lemah Wungkuk, di bagian selatan Kota Cirebon.⁸ Pada masa jayanya, yaitu dibawah pemerintahan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati (abad ke-15 hingga 16), wilayah kerajaan meliputi sepanjang pesisir Jawa Barat hingga Banten.⁹

¹ UNESCO. (2002). *Universal Declaration on Cultural Diversity: a Vision, a Conceptual Platform, a Pool of Ideas for Implementation, a New Paradigm*. Johannesburg: UNESCO.

² Oktikasari, S. (2008). *Studi Tata Lahan Lanskap Sejarah Kompleks Keraton di Kota Cirebon Jawa Barat, dan Upaya pelestariannya*. Fakultas pertanian Bogor, Arsitektur Lanskap. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

³ Sulendraningrat, P. (1978). *Sejarah Cirebon*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

⁴ Sulistiyono, S. T. (1997). Dari Lemahwungkuk hingga Cheribon. Dalam S. Zuhdi (Penyunt.), *Cirebon sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah* (II ed., hal. 77-116). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

⁵ Tjandrasasmita, Uka, *Arkeologi Islam Nusantara*, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2009

⁶ Atja, S. (1988). *Menjelang Penetapan Hari Jadi Pemerintahan Kabupaten DT. II Cirebon*. Cirebon: Pemerintah Kabupaten DT. II Cirebon.

⁷ Tjandrasasmita, U. (1998). Bandar Cirebon dalam Jaringan Pasar Dunia. Dalam S. Zuhdi (Penyunt.), *Cirebon sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah* (II ed., hal. 55-76). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

⁸ Sunardjo, U. (1983). *Meninjau Sepintas Panggung Sejarah Pemerintahan Kerajaan Cirebon 1479 - 1809*. Bandung: Penerbit Tarsito.

⁹ Sunardjo, U. (1983). *Meninjau Sepintas Panggung Sejarah Pemerintahan kerajaan Cirebon 1479 - 1809*. Bandung: Penerbit Tarsito.

Sejak dilantiknya Sunan Gunung Jati sebagai Raja dan Wali, Sunan Gunung Jati kemudian menghentikan Bulu Bakti kepada kerajaan Padjajaran.¹⁰ Pada masa ini, kemajuan terlihat dalam berbagai aspek seperti ekonomi, politik dan juga penyebaran agama Islam.¹¹ Namun supremasi kesultanan Cirebon hanya sampai pada pemerintahan Panembahan Girilaya. Setelah Panembahan Girilaya wafat, tampuk kekuasaan dilanjutkan oleh kedua putranya yakni Martawijaya dan Kartawijaya.¹² Martawijaya memerintah Kesultanan Kasepuhan Cirebon dengan gelar Sultan Sepuh I/Sultan Syamsuddin. Sedangkan Kartawijaya memerintah Kesultanan Kanoman Cirebon dengan gelar Sultan Anom/Sultan Badruddin. Pembagian kekuasaan ini disahkan oleh Sultan Ageng Tirtayasa.¹³ Panembahan Girilaya selanjutnya membagi kesultanan menjadi dua, yakni Kasepuhan yang dipimpin oleh Martawijaya dan Kanoman yang dipimpin oleh Kartawijaya.

Selanjutnya Kesultanan Cirebon mengalami keruntuhan sampai pada akhirnya urusan politik kesultanan dicampuri oleh VOC dan mengharuskan Sultan Cirebon menyerahkan wilayah kekuasaannya. Sejak saat itu, kesultanan Cirebon tidak memiliki wilayah administratif dan wewenang pemerintahan karena telah diakui oleh Belanda. Sejak pemerintah kolonial Belanda membatasi kekuasaan Kraton, maka pengaruh kekuasaan Kraton semakin berkurang, dan terus berlangsung hingga saat ini.¹⁴ Hasil diskusi dengan Pemerintah Kota Cirebon, serta para Sultan Cirebon (Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan) di bulan Maret 2019 menunjukkan eksistensi Kraton dalam pembangunan Kota Cirebon hampir tidak ada.¹⁵ Keberadaan Kraton hanya dianggap sebagai lembaga pemangku adat, yang berfungsi sebagai pemuka dan penjaga kelangsungan kebudayaan dan adat istiadat Cirebon dan juga hanya sebagai bagian dari sejarah Kota Cirebon.¹⁶

¹⁰ Rosidin, Didin Nurul, *Kerajaan Cirebon*, Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013.

¹¹ Adeng, Kuswiah, W., Wiryono, H., & Erwantoro, H. (1998). *Kota Dagang Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

¹² Salman, R., Sutjarda, D., & Sumaryono (Penyunt.). (2000). *Sejarah Pemerintahan Keresidenan Cirebon (tidak dipublikasi)*. Cirebon.

¹³ W.M., Abdul Hadi, *Indonesia Dalam Arus Sejarah (Kedatangan dan Peradaban Islam)*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2012.

¹⁴ Masduqi, Z. (2011). *Cirebon Dari Kota Tradisional ke Kota Kolonial*. Cirebon: Nurjati Press.

¹⁵ Kuntowijoyo. (2006). *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Kelompok Penerbit Tiara Wacana Yogya.

¹⁶ Muhaimin, A. G. (2006). *The Islamic Tradition of Cirebon: Ibadat and Adat Among Javanese Muslims*. Canberra: ANU Press.

Pada masa sekarang ini bisa dikatakan Cirebon memiliki dua model pemerintahan, yakni pemerintahan struktural dan kultural. Pemerintahan struktural, yakni pemerintahan yang berasaskan legitimasi negara, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah. Sedangkan pemerintahan kultural sendiri ialah “institusi” keraton sebagai penjaga adat dan tradisi setempat.¹⁷

Seiring dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, Cirebon berada di bawah kekuasaan Pemkot dan Pemkab Cirebon. Segala urusan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat Cirebon diatur oleh Pemda. Dengan dihapusnya fungsi pemerintahan keraton, bukan berarti keraton kehilangan eksistensinya. Sejak dulu selain memiliki kewenangan dalam mengatur segala urusan pemerintahan, kesultanan Cirebon juga berfungsi sebagai pemimpin adat dan penjaga tradisi setempat. Dalam hal ini keraton menjadi pusat dan penjaga kebudayaan Cirebon.

Apabila kondisi ini terus berlangsung, keberadaan dua model “pemerintah” dalam satu daerah akan memungkinkan timbulnya permasalahan dan rawan terjadi konflik,¹⁸ jika tidak ditangani secara cepat dan tepat. Hubungan baik antara Keraton dan Pemkot akan dipengaruhi oleh pola komunikasi antara pemangku jabatan Keraton dan pejabat Pemkot. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pola komunikasi yang digunakan oleh para pemangku jabatan Keraton dan pejabat Pemkot. Tidak sedikit konflik yang melibatkan para pemangku jabatan di daerah. Konflik tersebut, membutuhkan alternatif solusi dari kasus-kasus yang dihadapi selama ini.

B. Tinjauan Pustaka

1. Interaksionisme Simbolik

Teori yang dicetuskan oleh George Herbert Mead ini berasal dari kekaguman Mead terhadap kemampuan diri sang aktor (manusia) dalam menggunakan simbol. Ia menyatakan bahwa diri sang aktor bertindak berdasarkan makna simbol yang muncul dalam situasi tertentu. Makna dari simbol tersebut

¹⁷ Prawiraredja, M. (2005). *Cirebon: Falsafah, Tradisi, dan Adat Budaya*. Jakarta: Percetakan Negara.

¹⁸ Ihromi, T. O. (1996). *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

yang pada gilirannya membentuk esensi dari interaksionisme simbolik yang menekankan korelasional pada simbol dan interaksi.¹⁹

Pemikiran Mead ini berasal dari kemunculan persepsi terhadap simbol-simbol yang digunakan diri sang aktor dalam interaksi sosial.²⁰ Robert Audi menekankan bahwa ada empat elemen dasar dalam persepsi, yaitu: (1) perseptor, saya; (2) objek, bidang yang saya lihat; (3) pengalaman indrawi, menyatakan pengalaman visual saya terhadap warna dan bentuk; dan (4) hubungan antara objek dan subyek, umumnya dianggap sebagai hubungan kausal dimana objek menghasilkan pengalaman sensorik pada perseptor.²¹

Asumsi-asumsi pokok yang dilatarbelakangi teori interaksionisme simbolik, yakni: (1) Individu dilahirkan tanpa konsep diri. Konsep diri dibentuk dan berkembang melalui komunikasi dan interaksi sosial, (2) konsep diri terbentuk ketika seseorang bereaksi terhadap orang lain dan melalui persepsi atau perilaku tersebut, (3) konsep diri, setelah mengalami perubahan, menjadi motif dasar dari tingkah laku, (4) manusia adalah makhluk yang unik karena kemampuannya menggunakan dan mengembangkan simbol untuk keperluan hidupnya, (5) manusia bereaksi terhadap segala sesuatu tergantung bagaimana ia mendefinisikan sesuatu tersebut, dan (6) makna merupakan kesepakatan bersama di lingkungan sosial sebagai hasil interaksi.²²

2. Pola Komunikasi

Menurut William Albig, komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung makna diantara individu-individu.²³ Pola komunikasi bisa dikatakan sebagai bentuk proses penyampaian dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung makna diantara individu-individu. Dari segi sifatnya, pola komunikasi dibagi menjadi dua macam, yakni pola komunikasi formal dan informal.

¹⁹ Elbadiyansyah, dan Umiarso, *Interaksionisme Simbolik dari Era Klasik hingga Modern*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

²⁰ Koentjaraningrat. (2000). *Pengantar Ilmu Antropologi* (8 ed.). Jakarta: PT. Rineka Cipta.

²¹ Audi, Robert, *Epistemology: A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge*, London: Routledge, 2011.

²² Mufid, Muhammad, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2009.

²³ Anwar, Arif, *Ilmu Komunikasi (Sebagai Pengantar Ringkas)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

a. Pola Komunikasi Formal

Khomsahrial Romli dalam tulisannya membagi arah aliran komunikasi formal, yakni: komunikasi dari atas ke bawah, komunikasi dari bawah ke atas, komunikasi horizontal, komunikasi diagonal.

1. Komunikasi dari Atas ke Bawah

Komunikasi dari atas ke bawah merupakan aliran komunikasi yang biasanya digunakan dalam sebuah organisasi. Aliran komunikasi ini berasal dari individu atau kelompok yang secara struktural lebih tinggi kepada bawahannya. Biasanya pesan yang disampaikan berkaitan dengan tugas-tugas dan kontrol.

2. Komunikasi dari Bawah ke Atas

Komunikasi ke atas merupakan respon terhadap seberapa baik organisasi telah berfungsi. Fungsi komunikasi ke atas menurut Smith adalah sebagai balikan bagi pimpinan memberikan petunjuk tentang keberhasilan suatu pesan yang disampaikan kepada bawahan dan dapat memberikan stimulus kepada karyawan untuk berpartisipasi dalam merumuskan pelaksanaan kebijakan bagi organisasi.

3. Komunikasi Horizontal

Komunikasi horizontal merupakan aliran komunikasi dari dan ke individu atau kelompok yang secara struktur organisasi berada di status yang sama. Dalam ranah organisasi, komunikasi horizontal biasa terjadi dalam rapat komisi, interaksi pribadi, selama waktu istirahat, obrolan di telepon dan lain sebagainya.

b. Pola Komunikasi Informal

Pola komunikasi informal merupakan bentuk komunikasi yang bersifat cair. Artinya komunikasi yang dilakukan begitu saja, tanpa memperhatikan posisi dalam organisasi. Informasi mengalir dengan cairnya ke atas, ke bawah, dan juga horizontal. Ada beberapa macam gaya komunikasi, diantaranya adalah komunikasi secara terbuka (*the equalitarian style*), komunikasi bersifat mengendalikan (*the controlling style*), komunikasi terstruktur dengan pesan verbal (*the structuring style*), komunikasi yang berakibat melemahnya tindak komunikasi (*the withdrawal style*), komunikasi cenderung agresif (*the dynamic style*), dan

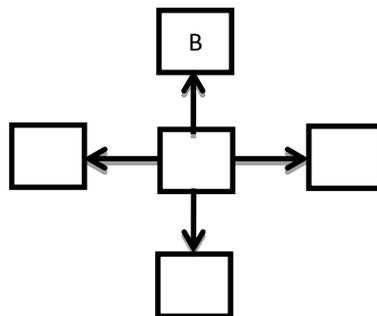
komunikasi yang mencerminkan kesediaan untuk menerima saran dan pendapat (*the relinquishing style*).

3. Pola Komunikasi H.A.W. Widjaja

Menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Komunikasi, Pengantar Studi”, pola komunikasi terbagi menjadi empat, yaitu: pola roda, pola rantai, pola lingkaran dan pola bintang. Berikut adalah penjelasan yang lebih komprehensif tentang pola-pola tersebut.

a. Pola Roda

Pola roda adalah pola yang mengarahkan seluruh informasi kepada individu yang menduduki posisi sentral. Seseorang dalam posisi sentral menerima kontak, informasi dan memecahkan masalah dengan sasaran atau persetujuan anggota lain.



Gambar 1: Pola Roda

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa orang yang berada di posisi sentral berkomunikasi dengan banyak orang, A berkomunikasi dengan B, C, D dan E. Pada pola komunikasi seperti ini kecenderungan yang terjadi adalah komunikasi satu arah tanpa reaksi ataupun umpan balik.

b. Pola Rantai

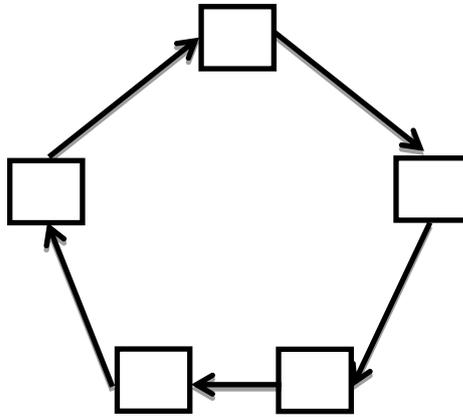
Pada pola rantai, jaringan komunikasi terdiri dari lima tingkatan dalam jaringan hierarkinya dan hanya meliputi komunikasi arus ke atas (*up ward*) dan ke bawah (*downward*). Ini berarti pola rantai menganut hubungan komunikasi garis langsung (komando) balik ke atas atau ke bawah tanpa adanya suatu penyimpangan. Untuk lebih jelasnya lihat gambar di bawah ini.



Gambar 2: Pola Rantai

c. Pola Lingkaran

Pola lingkaran memiliki kemiripan dengan pola rantai, akan tetapi komunikan terakhir (E) juga dapat berkomunikasi dengan komunikan pertama (A). Lebih jelasnya mari kitalihat gambar di bawah ini:

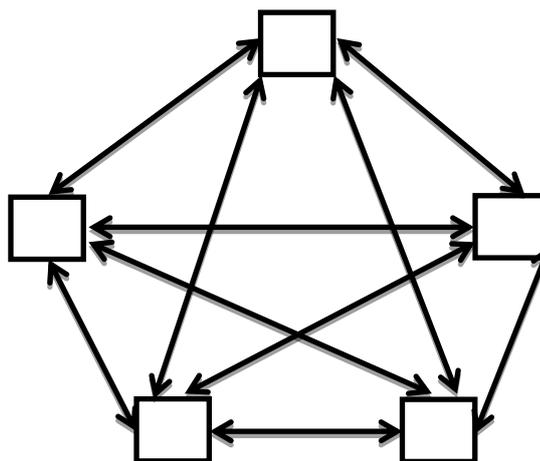


Gambar 3: Pola Lingkaran

Pada pola lingkaran tidak terdapat pemimpin. Semuanya berhak dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkomunikasi dengan orang yang berada di sisi masing-masing komunikan.

d. Pola Bintang

Pada pola ini setiap komunikan berkomunikasi dengan komunikan lainnya. Hampir mirip dengan pola lingkaran dimana semua anggota memiliki hak dan kekuatan untuk saling berkomunikasi, berikut adalah gambar pola bintang:



Gambar 4: Pola Bintang

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis bersifat subjektif. Penelitian kali ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan penelitian dengan memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.²⁴ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Dimana peneliti berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti.²⁵ Subjek penelitian ini adalah Keraton Kasepuhan dan Balai Kota Cirebon. Sedangkan objek penelitiannya adalah pemangku jabatan di Keraton Kasepuhan dan Pemerintah Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk memperoleh hasil akhir dalam penelitian, yaitu dengan cara menggambarkan ke dalam bentuk kalimat disertai kutipan-kutipan data dan menganalisis data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dari kumpulan dokumen-dokumen yang didapat.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian mengikuti cara-cara yang dikemukakan Burhan Bungin, yaitu: (1) pengumpulan data, merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data ini melalui wawancara, studi literasi dan studi dokumentasi; (2) reduksi data, sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data kasar yang tertulis di lapangan; (3) penyajian data, pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif; dan (4) verifikasi dan penegasan kesimpulan, merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna dari data yang telah disajikan.

D. HASIL DAN ANALISA DATA

1. Profil Informan

Pemangku jabatan Keraton Kasepuhan dalam hal ini merujuk kepada orang-orang yang bekerja di lingkungan keraton dan termasuk ke dalam struktur

²⁴ Loeckx, A. (1986). *Note on the Methodology of Urban Analysis*. Kaholike Universiteit Leuven.

²⁵ Mulyana, Deddy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

organisasi Badan Pengelola Keraton Kasepuhan (BPKK). Wawancara dilakukan pada sejumlah informan yang terbagi atas informan umum dan informan kunci. Narasumber pertama dari pihak keraton adalah Iman Sugiman. Beliau adalah salah satu “abdi dalem” yang bisa dikatakan cukup senior hampir 24 tahun di Keraton Kasepuhan. Beliau menjabat sebagai Koordinator Kepala Bagian Penerima Tamu. Jabatan ini baru diembannya selama satu tahun. Tanggung jawab terhadap jabatannya kali ini bisa dibilang cukup berat karena beliau yang harus bertanggung jawab dalam penerimaan tamu baik itu wisatawan domestik ataupun internasional. Diluar Keraton Kasepuhan, beliau juga aktif di KOMPEKPAR (Komunitas Penggerak Pariwisata) wilayah Cirebon. Pernah menjabat sebagai Sekretaris juga pada tahun lalu sebelum digantikan kepengurusan yang baru. Narasumber kedua Ahmad Jazuli. Beliau adalah salah satu dari lima orang staff yang ditunjuk oleh Sultan Sepuh XIV P.R.A. Arief Natadiningrat S.E. Jabatan sebagai Staff Sultan tersebut sudah diamanatkan kepada beliau sejak 2010 atau sejak Sultan Sepuh XIV diangkat.

Pejabat Pemerintah Kota Cirebon adalah pejabat negara yang bekerja di lingkungan Pemkot Cirebon. Dalam hal ini tepatnya dari Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata. Narasumber pertama dan utama dari Pemkot adalah Dana Kartiman. Jabatan beliau sekarang adalah Kepala DISPORBUDPAR. Beliau sudah menduduki jabatan tersebut sejak 15 Maret 2014. Bisa dibilang beliau adalah pejabat senior yang sudah cukup lama malang melintang di jajaran pejabat Pemkot Cirebon. Sebelum menjabat sebagai Kepala DISPORBUDPAR, beliau juga pernah menduduki beberapa jabatan di BAPUSIPDA dan Dinas Pendidikan yang kesemuanya di Kota Cirebon.

Kini, Cirebon diproyeksikan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Barat, dengan fokus wisata budaya dan sejarah.²⁶ Narasumber selanjutnya dari bagian pariwisata adalah Wiyono SA. Beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Bina Usaha Pariwisata. Jabatan ini sudah diembannya selama 4 tahun. Beliau juga menjadi ketua pelaksana kegiatan sosialisasi sadar wisata bagi *stakeholder* kepariwisataan yang dilaksanakan 2015 yang lalu. Menurut Fletcher (2003), *stakeholder* adalah kelompok yang memiliki perhatian dan kepentingan pada suatu

²⁶ Dinillah, Mukhlis. (2019). “Cirebon Diproyeksikan Jadi Destinasi Wisata Budaya dan Sejarah”. Tersedia secara online di: <https://travel.detik.com/travel-news/d-4746928/cirebondiproyeksikan-jadi-destinasi-wisata-budayadan-sejarah> [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 30 Oktober 2019].

permasalahan yang ditentukan dengan mempertimbangkan posisi penting dan pengaruh yang dimiliki.²⁷ Sedangkan narasumber dari bagian kebudayaan sendiri adalah Sugiyono. Sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Bina Nilai Tradisional Sepuh dan Purbakala. Beliau dipercaya memegang jabatan ini selama empat tahun terakhir. Sebagai Kasie Bina Niltrasepur beliau bertanggung jawab dalam pemeliharaan setiap unsur kebudayaan yang ada di Cirebon.

Sebagai bagian dari observasi penelitian kali ini adalah dengan turut serta dalam beberapa pertemuan yang dilakukan oleh Keraton Kasepuhan dan Pemkot Cirebon, berikut adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh kedua pihak. Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan penyelenggaraan Maulid Nabi Muhammad SAW atau yang kerap kali disebut sebagai Panjang Jimatan oleh masyarakat Cirebon. Pihak yang diundang antara lain Pemkot, dari pejabat tingkat RT sampai Walikota, Kepolisian, TNI, sanak famili, dan tentunya masyarakat sekitar. Tujuan dari diselenggarakannya rapat koordinasi ini tentunya adalah perihal tercapainya persiapan dan kesiapan yang matang pada penyelenggaraan Panjang Jimatan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja yang terkoordinasi dan terintegrasi dari semua pihak, seperti masalah tentang keamanan, kenyamanan, dan tentunya kebersihan. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Keraton Kasepuhan memiliki daya tarik tersendiri karena mengandung unsur budaya yang sangat kental. Salah satu warisannya yang masih tetap dilestarikan adalah perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Unsur budaya sangat terasa pada puncak perayaan di Keraton Kasepuhan, didalamnya terdapat ritual upacara panjang jimat. Upacara panjang jimat sendiri merupakan pencucian benda pusaka.²⁸ Iring-iringan tersebut, berangkat dari dalam Keraton Kasepuhan sampai Langgar Alit yang masih berada dalam pelataran Keraton.²⁹ Filosofi yang terkandung dalam setiap kegiatan kebudayaan tersebut, tidak hanya dimaknai sebagai suatu yang dipercaya, tetapi menjadi suatu yang penting untuk dihadiri. Pentingnya kehadiran dan keterlibatan mereka pada ritual tradisi tersebut,

²⁷ Fletcher S. (2003). *Competence-Based Assessment Techniques*. Jakarta: PT. Gramedia.

²⁸ Falah, W. A. (1997). Tinjauan Konsepsi Seni Bangunan Istana Peninggalan Masa Islam di Kesultanan Cirebon dalam Konteks Kesenambungan Budaya. Dalam *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah* (hal. 141-162). Jakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan.

²⁹ Marlina, A. (2003). *Gapura dan Kori Keraton Kasunanan Surakarta, dalam Aspek Simbolis*. Universitas Diponegoro, Program Pascasarjana Magister Teknik Arsitektur. Semarang: Universitas Diponegoro.

dipercaya dapat membangun ‘*spirit of place*’. Spirit ini yang kemudian mengikat warga dengan Kraton sebagai tempat pelaksanaan ritual tradisi.³⁰

Kemudian Pagelaran atau pertunjukan seni tari yang merupakan gagasan dari Sultan Sepuh XIV. Kepedulian pada pelestarian dan pengembangan kesenian dituangkan dalam bentuk pagelaran kolaboratif antara tari Bian Lian dari Tiongkok dan tari Topeng dari Cirebon. Gagasan ini muncul ketika beliau mengunjungi Tiongkok dan disambut dengan tari Bian Lian. Tari Bian Lian ini sendiri merupakan jenis tari-tarian yang menggunakan topeng sebagai pusat daya tariknya. Cirebon sendiri memiliki tari sejenis, namun dengan warna dan bentuk topeng yang berbeda, jenis tari ini biasa disebut tari Topeng. Dengan latar belakang kesamaan pada penggunaan topeng, maka sultan pun berinisiatif untuk membuat pagelaran kolaborasi tari Bian Lian dan tari Topeng. Selain itu juga sosialisasi sadar wisata bagi seluruh *stakeholders* Kota Cirebon. Pemangku kepentingan dibedakan menjadi pemangku kepentingan primer (utama), pemangku kepentingan sekunder (pendukung) dan pemangku kepentingan kunci.³¹ Kegiatan ini merupakan respon terhadap kondisi kepariwisataan di Kota Cirebon. Kondisi kepariwisataan di Cirebon sendiri tidak bias dikatakan sepenuhnya baik. Oleh karena itu, Pemkot dalam hal ini melalui bagian Pariwisata mencoba untuk mengumpulkan *stakeholders* di Kota Cirebon untuk membicarakan tentang pengembangan pariwisata di Cirebon. *Stakeholders* yang dimaksud dalam hal ini adalah para pengelola cagar budaya yang didalamnya termasuk dari Keraton Kasepuhan, kuncen situs-situs budaya, pengelola hotel, kuliner dan travel. Kegiatan ini sendiri diisi oleh Kepala DISBUDPAR Provinsi Jawa Barat dan Kepala DISPORBUDPAR.

Tidak lupa membuat laporan data pengunjung Keraton Kasepuhan. Kegiatan ini merupakan bentuk controlling dari Pemkot terhadap pemberdayaan cagar budaya. Semua cagar budaya yang terletak di Kota Cirebon diharuskan membuat data pengunjung dan melaporkan kepada Pemkot setiap bulan. Termasuk Keraton

³⁰ Hady, M. S. (2006). *Pandangan Dunia Spritual Islam dan Peran Sentral Manusia dalam Kosmos. Annual Conference Departemen Agama*. Lembang, Subang: Departemen Agama.

³¹ Roslinda, E., Darusman, D., Suharjito, D., Nurrochmat, D.R. (2012). Analisis pemangku kepentingan dalam pengelolaan Taman Nasional Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 18, 78-85. DOI:10.7226/jtfm.18.2.78

Kasepuhan di dalamnya. Data ini dibutuhkan sebagai pertimbangan dalam pengembangan pemberdayaan cagar budaya ke depannya.

Ditambah lagi sowan, yang dimaksud sowan disini adalah kunjungan yang tidak direncanakan. Sengaja tidak dimasukkan ke dalam agenda resmi ataupun terencana karena untuk menghilangkan kesan kaku dalam hubungan yang berlangsung diantara pihak, waktu sowan pun bisa kapan saja tanpa memperhitungkan waktu. Kegiatan sowan ini sering dilakukan oleh Pemkot untuk menjaga silaturahmi dengan pihak Keraton Kasepuhan. Penerimaannya pun tidak mesti oleh Sultan, melainkan bisa dengan siapa saja, biasanya yang menerima adalah orang-orang yang masuk dalam jajaran BPKK (Badan Pengelola Keraton Kasepuhan).

2. Analisa Hasil Temuan

Analisa hasil temuan penelitian model kualitatif deskriptif analisis mengacu pada nilai-nilai objektivitas. Fokus analisisnya sendiri adalah pada pola komunikasi pemangku jabatan Keraton Kasepuhan dengan Pejabat Pemkot. Pola komunikasi yang dimaksud adalah tentang pola komunikasi formal dan informal. Selain itu, tentunya juga dilakukan analisa terhadap pola-pola komunikasi dalam bentuk lingkaran, roda, rantai dan bintang.

Keraton sendiri pada perkembangannya sudah menjadi penjaga dan pelestari adat yang terlembaga dan melembaga.³² Terlembaga dan melembaga dalam artian secara struktur organisasi dan gerak langkah keraton sudah mengalami beberapa perubahan atau lebih tepatnya mengalami modernisasi selayaknya instansi atau lembaga-lembaga pada masa sekarang. Perubahan tersebut tidak lantas mengubah keseluruhan wajah keraton, seperti dalam hal struktur organisasi misalnya, struktur organisasi tradisional tetap dipertahankan meskipun telah membentuk struktur organisasi modern. Pembentukan struktur organisasi modern ini lebih dikarenakan untuk menjawab kebutuhan zaman.

Perubahan struktur organisasi tersebut berdampak pada gerak langkah yang melembaga pula, keraton pada masa sekarang mau tidak mau harus mengikuti prosedur administrasi yang berlaku. Seperti dalam hal surat-menyurat, laporan

³² Arismunandar, A., & Pudjiastuti, T. (1998). Sumber-sumber Tekstual tentang Sejarah Cirebon. Dalam S. Zuhdi (Penyunt.), *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah* (II ed., hal. 193-202). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

data pengunjung, ataupun pengajuan proposal untuk menjalin kerjasama dengan Pemerintah dan swasta. Pihak keraton sendiri menganggap Pemkot, yang dalam hal ini sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat sebagai rekan dan juga pemilik bersama Keraton Kasepuhan.

Pemkot dan keraton sebagai rekan atau mitra, maksudnya disini adalah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kebudayaan dan kepariwisataan.³³ Di dalamnya termasuk kegiatan-kegiatan adat dan tradisi juga. Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan Iman Sugiman, salah satu abdi dalem atau juru pelihara Keraton Kasepuhan yang menyatakan “Keraton juga milik negara, jadi Pemerintah Kota dan Keraton harus saling bekerja sama”. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keraton tidak independen, tidak lagi berdiri sendiri. Tidak lagi memiliki fungsi pemerintahan yang memungkinkannya untuk mengatur segala sesuatunya sendiri.

Hal ini juga dapat dilihat dari pelibatan pejabat pemerintahan dalam struktur organisasi Badan Pengelola Keraton Kasepuhan (BPKK). Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat dan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata menjabat sebagai pembina, yang dalam hal ini sejajar dengan Sultan Sepuh. Kesamaan posisi tersebut menjadikan Sultan dan Pejabat Pemerintah tersebut dapat mengawasi sekaligus memberikan pengarahan dalam kepengurusan BPKK.

Suasana “kemitraan” juga tergambar dalam kegiatan-kegiatan Keraton yang mengundang pihak Pemerintah Kota Cirebon. Pada kegiatan Rapat Persiapan Maulid Nabi Muhammad SAW ketika Sultan yang memimpin rapat berbesar hati mempersilahkan pejabat daerah menyampaikan sepatah – dua patah kata demi terselenggaranya kegiatan Maulid dengan lancar. Hal ini dilakukan karena Keraton memandang unsur-unsur pemerintahan sebagai mitra, sebagai rekanan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kebudayaan.

Dalam konteks pemberdayaan dan pelestarian adat dan tradisi, pemerintah berperan sebagai pembina.³⁴ Sesuai dengan yang tertera dalam UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Oleh karena itu, untuk mengetahui pola-pola komunikasi yang digunakan Keraton kasepuhan dalam berkomunikasi dengan

³³ Kaya, L. G. (2002, 04 03). Cultural Landscape for Tourism. *ZKÜ Bartin Orman Fakültesi Dergisi*, 4(4), 54-60.

³⁴ Salman, R., Sutjarda, D., & Sumaryono (Penyunt.). (2000). *Sejarah Pemerintahan Keresidenan Cirebon (tidak dipublikasi)*. Cirebon.

Pemerintah Kota, kita dapat melihatnya dari simpul-simpul pertemuan yang dilakukan oleh Keraton Kasepuhan dengan Pemerintah Kota. Dalam hal ini Keraton Kasepuhan berperan sebagai inisiator dan Pemerintah Kota sebagai undangan, berikut adalah simpul-simpul pertemuannya.

Simpul pertemuan yang pertama ini bisa kita kategorisasikan sebagai komunikasi formal. Padarapat koordinasi ini, undangan datang dari pihak internal dan eksternal. Pihak internal dalam hal ini adalah orang-orang yang tergabung dalam struktur organisasi BPKK (Badan Pengelola Keraton Kasepuhan), sanak famili dan kerabat. Sedangkan pihak eksternal yang dimaksud adalah dari unsur kepolisian, TNI (Tentara Nasional Indonesia), Pemerintah Kota, wartawan dan juga peneliti. Dalam rapat koordinasi ini dilakukan komunikasi dari atas ke bawah saat Sultan membacakan dan memberikan SK kepanitiaan perayaan maulid Nabi Muhammad SAW dan memberikan arahan perihal persiapan apa saja yang harus dilakukan kepada panitia pelaksana. Selain memberikan instruksi tugas, Sultan pun memberikan rasional untuk membuat semua pihak terkait merasa bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing. Pola komunikasi Sultan kepada pihak internal menggunakan pola roda. Pada pola roda, Sultan berkomunikasi dengan dengan banyak orang. Orang-orang yang dimaksud adalah mereka yang masuk ke dalam kategori pihak internal yang kemudian menjadi panitia pelaksana perayaan maulid. Pada rapat koordinasi ini, memang tidak terjadi timbal balik dari pihak internal kepada Sultan. Hal ini karena pesan yang disampaikan Sultan berupa instruksi tugas dan rasional sehingga tidak membutuhkan timbal balik.

Kemudian pola komunikasi yang digunakan sultan saat berkomunikasi dengan pihak eksternal adalah pola komunikasi horizontal. Sultan menganggap pihak eksternal sendiri sebagai mitra. Mitra dalam penyelenggaraan maulid dan dalam kehidupan sehari-hari. Selain pola horizontal, Sultan pun menggunakan pola komunikasi bintang dalam berkomunikasi dengan pihak eksternal. Ini terlihat pada saat Sultan selesai berbicara, beliau mempersilakan pihak eksternal untuk turut berbicara dan memberikan tanggapannya perihal persiapan perayaan maulid. Pada pola bintang seperti ini, Sultan memposisikan diri sama dengan pihak eksternal. Dengan demikian pihak eksternal, dalam hal ini Kapolsek dan Lurah Lemahwungkuk juga turut berbicara mengenai persiapan dan kesiapan penyelenggaraan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW (Panjang Jimatan).

Pada upacara panjang jimat ini sebenarnya tidak terjadi banyak komunikasi dan interaksi. Hal utama adalah seremonial iring-iringan dan momen berebut makanan yang telah didoakan dan dianggap memiliki keberkahan.

Pola komunikasi yang digunakan oleh Sultan pada upacara panjang jimat ini masih tetap menggunakan pola komunikasi formal. Pola komunikasi formal yang terlihat pada kegiatan ini adalah pemberian instruksi tugas. Selain itu, pola yang tergambar dalam hal ini adalah pola rantai. Dimana semua pelaku komunikasi terikat oleh struktur. Dengan demikian, komunikasi yang terjadi hanya dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Pada prakteknya, panitia pelaksana memberikan laporan kesiapan pelaksanaan upacara panjang jimat secara keseluruhan kepada staf Sultan. Setelah semua laporan kesiapan pelaksanaan sudah diterima, staf Sultan pun menyampaikan laporannya kepada Sultan. Sultan pun merespon hal tersebut kepada staf Sultan. Staf Sultan memberikan arahan kepada panitia pelaksana agar segera memulai upacara panjang jimat.

Pada kesempatan ini, dalam berkomunikasi dengan pihak eksternal, Sultan menggunakan pola komunikasi informal. Informasi mengalir dengan cairnya dari atas ke bawah, bawah ke atas, dan horizontal. Hal ini terjadi karena momen pertemuan Sultan dengan pihak eksternal pada saat sesi makan bersama. Diutamakan keramahan dan kebersamaan tanpa memandang status.

Kemudian pagelaran kolaborasi seni tari biantan dan tari topeng. Bentuk acara ini sendiri adalah pertunjukan seni tari, sehingga fokus utamanya adalah panggung. Oleh karena itu, pola komunikasi yang terbangun pun tak sebanyak saat rapat. Pola komunikasi yang terbangun adalah pola komunikasi formal. Tepatnya pola komunikasi formal horizontal. Ini terlihat dari bagaimana cara Sultan memperlakukan tamu-tamu undangannya. Pihak Pemerintah baik Kota ataupun Kabupaten juga diberikan kesempatan untuk turut memberikan sambutan.

Analisa pola komunikasi Pejabat Pemkot dengan Pemangku Jabatan Keraton. Pandangan Pemkot sendiri terhadap Keraton Kasepuhan tentunya adalah konstitusi yang berlaku di NKRI. Konstitusi tersebut mencakup UUD 1945, UU Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah. Sebagai bagian struktural atau kepanjangan tangan Pemerintah Pusat, Pemkot dalam hal ini bertanggung jawab dalam pembinaan adat dan tradisi yang ada. Pembinaan adat dan tradisi tersebut akan dapat terselenggara dengan baik ketika kedua belah pihak, yakni pembina

dan yang dibina memiliki hubungan yang baik. Pemkot sendiri memiliki dua pandangan terhadap Keraton Kasepuhan. Pertama, sebagai Cagar Budaya yang harus dilindungi, dipelihara, dan dikembangkan.³⁵ Kedua, sebagai tujuan wisata.

Keraton sebagai Cagar Budaya sendiri tentunya mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dirumuskan istilah “pengembangan” adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan; serta istilah “pemanfaatan” yaitu upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.³⁶ Sebagai pelaksana dan pengembang konstitusi, Pemerintah Kota dalam hal ini turut berperan aktif dalam pemeliharaan bangunan dan pemberian bantuan pada program-program atau kegiatan kebudayaan yang sifatnya pertunjukan Keraton Kasepuhan sebagai Cagar Budaya.³⁷

Seiring berjalannya waktu, ketika semua kerajaan dan keraton di seluruh nusantara memutuskan untuk menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka fungsi pemerintahan pun dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, kerajaan dan keraton tersebut beralih fungsi menjadi Cagar Budaya yang harus dilindungi negara.³⁸ Implikasinya adalah keraton kini menjadi tujuan wisata,³⁹ baik wisata sejarah, pendidikan, ataupun agama.⁴⁰ Sebagai tujuan wisata, Keraton Kasepuhan pun tak luput dari perhatian Pemkot. Perhatian tersebut biasanya berupa pemberdayaan dan pelatihan-pelatihan kepariwisataan, seperti pelatihan pemandu wisata misalnya. Selain itu juga ada pemberian dana atau insentif dalam setiap kegiatan kepariwisataan yang diselenggarakan.

³⁵ Singh, R. P. (2010). *Heritagescape and Cultural Landscapes*. Dalam R. P. Singh (Penyunt.), *Heritagescape and Cultural Landscapes: An Appraisal* (hal. 7-56). New Delhi, India: Shubhi Publications.

³⁶ Setiawan, Ikwan. (2017). “Pemajuan Kebudayaan: Membandingkan Cara Negara dan Rakyat” dalam *Mata Timoer Institute*, pada 29 Agustus.

³⁷ Fowler, P. (2003). *World Heritage Cultural Landscape, 1992-2002: a Review and Prospect. Cultural Landscape: The Challenges of Conservation. World Heritage 2002 Shared Legacy, Common Responsibility Associated Worldshops* (hal. 16-32). Ferrara: UNESCO, World Heritage Centre.

³⁸ Rössler, M. (2006). *World Heritage Cultural Landscapes: A UNESCO Flagship Programme 1992-2006. Landscape Research*, 31(4), 333-353.

³⁹ Ahmad, J. J. (2010). *The Javanese Perceptions of Landscape*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.

⁴⁰ Ali, A. (2007). *Tradisi Kliwonan Gunung Jati Cirebon potensi dan Masalahnya sebagai Wisata Religi*. Cirebon: Kerjasama Penerbit Andira dan Bakorwil Cirebon.

Berikut ini adalah simpul-simpul pertemuan antara Pemkotdengan Keraton Kasepuhan:

1. Sosialisasi Sadar Wisata bagi para Stakeholder Kepariwisataan

Kondisi pariwisata di kota Cirebon memang belum bisa dikatakan optimal, sehingga perlu peningkatan dalam beberapa sektor. Atraksi pariwisata yang disajikan di atas merupakan *event tourism*, yang bersifat lokal dan dikembangkan untuk memperkuat destinasi wisata di Cirebon, Jawa Barat, Indonesia.⁴¹ Oleh karena itu, Pemkot, khususnya DISPORBUDPAR mencoba untuk berembuk bersama membicarakan tentang pengembangan sektor pariwisata di Cirebon. Pihak yang diundang pun ialah para *stakeholders* kepariwisataan, seperti pengelola tujuan wisata, hotel, travel dan juga kuliner. Termasuk di dalamnya perwakilan dari Keraton Kasepuhan, kegiatan ini diwakili Iman Sugiman. Pola komunikasi yang terbangun dalam kegiatan ini adalah pola komunikasi formal. Kita bisa melihatnya pada interaksi yang terjadi antara Kepala DISPORBUDPAR dengan ketua pelaksana kegiatan dan saat sesi tanya jawab dibuka untuk umum.

2. Pola Komunikasi Kepala DISPORBUDPAR dengan Ketua Pelaksana

Pola komunikasi formal yang tergambar ketika Kepala DISPORBUDPAR berkomunikasi dengan ketua pelaksana adalah instruksi tugas dan komunikasi ke atas. Dalam hal ini, ketua pelaksana memberikan laporan terkait kesiapan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Sadar Wisata bagi para *Stakeholders* Kepariwisataan Kota Cirebon kepada Kepala DISPORBUDPAR. Respon yang diberikan Kepala DISPORBUDPAR adalah perintah agar segera dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi Sadar Wisata bagi para *Stakeholders* Kepariwisataan di Kota Cirebon. Ini merupakan bentuk intruksi tugas.⁴² Selain pola komunikasi seperti di atas yang telah disebutkan, kita juga dapat melihat bagaimana pola rantai digunakan oleh Kepala DISPORBUDPAR dan ketua pelaksana saat berkomunikasi.

3. Pola Komunikasi Kepala DISPORBUDPAR Kota Cirebon dan Kepala DISBUDPAR Provinsi Jawa Barat dengan *Stakeholder* di Kota Cirebon

⁴¹ Nurhana, Dini, Wanjat Kastolani & Gumelar S. Sastrayuda. (2013). "Pengembangan Tamansari Gua Sunyaragi sebagai Daya Tarik Wisata Budaya di Kota Cirebon" dalam *Antologi Manajemen Resort & Leisure*, Vol.1, No.2 [Juni].

⁴² Sunardjo, U. (1983). *Meninjau Sepintas Panggung Sejarah Pemerintahan Kerajaan Cirebon 1479 - 1809*. Bandung: Penerbit Tarsito.

Pola komunikasi yang tergambar pada saat kegiatan sosialisasi adalah pola komunikasi formal. Hal ini Kepala DISPORBUDPAR dan Kepala DISBUDPAR memposisikan diri sebagai pembina. Dengan memposisikan diri sebagai pembina, Kepala DISPORBUDPAR Kota Cirebon dan Kepala DISBUDPAR Jawa Barat menggunakan pola komunikasi dari atas ke bawah. Terdapat beberapa bentuk pola komunikasi dari atas ke bawah pada kegiatan ini. Seperti rasional dan ideologi. Selain pola komunikasi formal, dalam kegiatan ini juga kita dapat melihat pola bintang yang digunakan oleh Kepala DISPORBUDPAR kota Cirebon dan Kepala DISBUDPAR Jawa Barat dalam berkomunikasi dengan Stakeholders Kepariwisata. Pola bintang hampir mirip dengan pola lingkaran dimana semua anggota memiliki hak dan kekuatan untuk saling berkomunikasi

4. Laporan Data Pengunjung Keraton Kasepuhan

Pola komunikasi yang terbangun pada laporan data pengunjung dapat dikategorisasikan sebagai pola komunikasi formal. Jenis pola komunikasi formal yang dimaksud adalah pola komunikasi horizontal. Hal ini dapat terjadi karena para pelaku komunikasinya dapat dikatakan berada pada status yang sama, staf dalam organisasi masing-masing. Pihak Pemkot yang menerima laporan adalah dari bagian Pariwisata, hal ini Kepala Seksi Bina Usaha Pariwisata, Wiyono. Sedangkan yang memberikan laporan dari pihak Keraton Kasepuhan biasanya adalah Iman Sugiman, Kepala Bagian Pemandu BPKK.

5. Sowan

Hasil dari penelitian dapat dilihat bahwa dalam prakteknya, terdapat berbagai jenis pola komunikasi yang digunakan oleh pemangku jabatan Keraton Kasepuhan dan pejabat Pemkot. Ketika Keraton bertindak sebagai inisiator kegiatan, seperti pada rapat koordinasi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pagelaran kolaborasi Tari Bian Lian dengan Tari Topeng, pola yang tergambar adalah pola komunikasi formal. Tepatnya formal-horizontal. Di mana pihak eksternal, termasuk dari Pemkot dan DISPORBUDPAR juga turut berbicara dalam kegiatan tersebut. Pola bintang juga terlihat dalam pelaksanaan rapat koordinasi, dalam rapat tersebut tidak hanya Sultan saja yang memiliki hak untuk berbicara. Pola komunikasi berbeda terlihat pada saat perayaan maulid, di mana pola komunikasi informal diterapkan. Pola tersebut diterapkan mengingat sesi pertemuannya pada saat makan bersama.

Hampir mirip dengan pola komunikasi yang digunakan Keraton, Pemkot yang menginisiasi kegiatan Sosialisasi Sadar Wisata, Laporan Pengunjung Bulanan dan Sowan juga menggunakan pola komunikasi formal-horizontal. Hal ini tergambar pada saat kegiatan Sosialisasi Sadar Wisata dan Laporan Pengunjung Bulanan. Selain itu, pejabat Pemkot juga menggunakan pola bintang saat kegiatan Sosialisasi Sadar Wisata. Di mana peserta kegiatan, termasuk dari Keraton Kasepuhan juga turut merespon materi yang disampaikan. Pola komunikasi informal baru tergambar pada saat sowan karena bukan kunjungan formal dan tanpa disertai dengan kepentingan khusus, sehingga komunikasi yang terjadi pun berjalan cair dan mengalir.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang dilakukan tentang pola komunikasi pemangku jabatan Keraton Kasepuhan dan pejabat Pemkot Cirebon, maka dapat ditarik kesimpulan Pola Komunikasi pemangku jabatan Keraton Kasepuhan dengan pejabat Pemkot berlangsung pada ranah formal dan informal. Pola komunikasi formal terjadi pada rapat koordinasi Maulid Nabi Muhammad SAW (panjang jimat) dan pagelaran kolaborasi tari Bian Lian dan Tari Topeng. Sedangkan pola komunikasi informal terjadi pada saat perayaan Maulid Nabi (panjang jimat). Pada prakteknya, pemangku jabatan Keraton Kasepuhan juga menggunakan pola komunikasi horizontal pada saat rapat koordinasi dan pagelaran tari. Dengan menggunakan pola horizontal, pemangku jabatan Keraton Kasepuhan mencoba untuk bersikap egaliter terhadap pejabat Pemkot. Adapun pola bintang juga tergambar dalam komunikasi yang digunakan oleh pemangku jabatan Keraton Kasepuhan pada saat rapat koordinasi Maulid Nabi Muhammad (panjang jimat). Pola bintang setiap komunikator memiliki kekuatan dan kesempatan yang sama dalam berkomunikasi dengan komunikator lainnya, termasuk pejabat Pemkot.

Pola komunikasi pejabat Pemkot dengan pemangku jabatan Keraton Kasepuhan juga berlangsung pada ranah formal dan informal. Pada ranah formal terlihat pejabat Pemkot menggunakan pola komunikasi horizontal. Tepatnya pada saat kegiatan sosialisasi sadar wisata dan laporan bulanan pengunjung. Hal ini dilakukan karena pemerintah berperan sebagai Pembina bagi pelaku dan

pemerhati ataupun pengelola cagar budaya, termasuk didalamnya pemangku jabatan Keraton Kasepuhan. Di samping itu juga pejabat Pemkot menggunakan pola bintang dalam interaksinya pada saat kegiatan sosialisasi sadar wisata. Pola ini sendiri dipilih karena salah satu tujuan dari kegiatan sosialisasi sadar wisata ini bertujuan untuk menampung aspirasi para pelaku pariwisata.⁴³

⁴³ World Heritage Center. (2008). Operating Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. *Intergovernmental Committee for The Protection of the World Cultural and Natural Heritage*. Paris: UNESCO World Heritage Center.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeng, Kuswiah, W., Wiryono, H., & Erwantoro, H. (1998). *Kota Dagang Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ahmad, J. J. (2010). *The Javanese Perceptions of Landscape*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Ali, A. (2007). *Tradisi Kliwonan Gunung Jati Cirebon potensi dan Masalahnya sebagai Wisata Religi*. Cirebon: Kerjasama Penerbit Andira dan Bakorwil Cirebon.
- Ambary, H. M. (1998). Peranan Cirebon sebagai Pusat Pengembangan dan Penyebaran Islam. Dalam S. Zuhdi (Penyunt.), *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah (hal. 141-162)*: (II ed., hal. 35-54). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Anwar, Arif, *Ilmu Komunikasi (Sebagai Pengantar Ringkas)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Arismunandar, A., & Pudjiastuti, T. (1998). Sumber-sumber Tekstual tentang Sejarah Cirebon. Dalam S. Zuhdi (Penyunt.), *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah* (II ed., hal. 193-202). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Atja, S. (1988). *Menjelang Penetapan Hari Jadi Pemerintahan Kabupaten DT. II Cirebon*. Cirebon: Pemerintah Kabupaten DT. II Cirebon.
- Audi, Robert, *Epistemology: A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge*, London: Routledge, 2011.
- Dinillah, Mukhlis. (2019). "Cirebon Diproyeksikan Jadi Destinasi Wisata Budaya dan Sejarah". Tersedia secara online di: <https://travel.detik.com/travel-news/d-47wQbNPTDJP9hMYdvogK2hAUiHsGeiybwaWe36bwtRQ3UTpYV7YuZ8FV5j9nauFCWwcjM6dTzpL5s2N79Rp5unwdMvc8ZKUBarat, Indonesia: 30 Oktober 2019>].
- Elbadiyansyah, dan Umiarso, *Interaksionisme Simbolik dari Era Klasik hingga Modern*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Falah, W. A. (1997). Tinjauan Konsepsi Seni Bangunan Istana Peninggalan Masa Islam di Kesultanan Cirebon dalam Konteks Kesenambungan Budaya. Dalam *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah* (hal. 141-162). Jakarta:
- Fowler, P. (2003). World Heritage Cultural Landscape, 1992-2002: A Review and Prospect. *Cultural Landscape: The Challenges of Conservation. World Heritage 2002 Shared Legacy, Common Responsibility Associated Worldshops* (hal. 16-32). Ferara: UNESCO, World Heritage Centre.
- Hady, M. S. (2006). Pandangan Dunia Spritual Islam dan Peran Sentral Manusia dalam Kosmos. *Annual Conference Departemen Agama*. Lembang, Subang: Departemen Agama.
- Ihromi, T. O. (1996). *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kaya, L. G. (2002, 04 03). Cultural Landscape for Tourism. *ZKÜ Bartin Orman Fakültesi Dergisi*, 4(4), 54-60.
- Koentjaraningrat. (2000). *Pengantar Ilmu Antropologi* (8 ed.). Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Kuntowijoyo. (2006). *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Kelompok Penerbit TiaraWacana Yogya.
- Loeckx, A. (1986). *Note on the Methodology of Urban Analysis*. Kaholike UniversiteitLeuven.
- Masduqi, Z. (2011). *Cirebon Dari Kota Tradisional ke Kota Kolonial*. Cirebon: Nurjati Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. London:Sage Publications.
- Mufid, Muhammad,*Etika dan Filsafat Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Muhaimin, A. G. (2006). *The Islamic Tradition of Cirebon: Ibadat and Adat Among Javanese Muslims*. Canberra: ANU Press.
- Muhaimin, A. G. (2006). *The Islamic Tradition of Cirebon: Ibadat and Adat Among Javanese Muslims*.Canberra: ANU Press.
- Mulyana, Deddy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Nurhana, Dini, Wanjat Kastolani & Gumelar S. Sastrayuda. (2013). “Pengembangan Tamansari Gua Sunyaragi sebagai Daya Tarik Wisata Budaya di Kota Cirebon” dalam *Antologi Manajemen Resort & Leisure*, Vol.1, No.2 [Juni].
- Oktikasari, S. (2008). *Studi Tatanan Lanskap Sejarah Kompleks Keraton di Kota Cirebon Jawa Barat, dan Upaya pelestariannya*. Fakultas pertanian Bogor, ArsitekturLanskap. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Prawiraredja, M. (2005). *Cirebon: Falsafah, Tradisi, dan Adat Budaya*. Jakarta: PercetakanNegara.
- Rosidin, Didin Nurul,*Kerajaan Cirebon*, Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2013.
- Rössler, M. (2006). World Heritage Cultural Landscapes: A UNESCO Flagship Programme1992-2006. *Landscape Research*, 31(4), 333-353.
- Salman, R., Sutjarda, D., & Sumaryono (Penyunt.). (2000). *Sejarah PemerintahanKeresidenan Cirebon (tidak dipublikasi)*. Cirebon.
- Setiawan, Ikwana. (2017). “Pemajuan Kebudayaan: Membandingkan Cara Negara dan Rakyat” dalam *Mata Timoer Institute*, pada 29 Agustus.
- Singh, R. P. (2010). Heritagescape and Cultural Landscapes. Dalam R. P. Singh (Penyunt.), *Heritagescape andCultural Landscapes: An Appraisal* (hal. 7-56). New Delhi, India: Shubhi Publications.
- Sulendraningrat, P. (1978). *Sejarah Cirebon*. Jakarta: Departemen Pendidikan danKebudayaan.
- Sulistiyono, S. T. (1997). Dari Lemahwungkuk hingga Cheribon. Dalam S. Zuhdi (Penyunt.),*Cirebon sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah* (II ed., hal.77-116). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Sunardjo, U. (1983). *Meninjau Sepintas Panggung Sejarah Pemerintaha kerajaan Cerbon1479 - 1809*. Bandung: Penerbit Tarsito.
- Sunardjo, U. (1983). *Meninjau Sepintas Panggung Sejarah Pemerintaha kerajaan Cerbon 1479 - 1809*.Bandung: Penerbit Tarsito.
- Tjandrasasmita, U. (1998). Bandar Cirebon dalam Jaringan Pasar Dunia. Dalam S. Zuhdi(Penyunt.), *Cirebon sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah*(II ed., hal. 55-76). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Tjandrasasmita, Uka, *Arkeologi Islam Nusantara*, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2009.
- UNESCO. (2002). *Universal Declaration on Cultural Diversity: A Vision, A Conceptual Platform, A Pool of Ideas for Implementation, a New Paradigm*. Johannesburg: UNESCO.
- W.M., Abdul Hadi, *Indonesia Dalam Arus Sejarah (Kedatangan dan Peradaban Islam)*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2012.
- World Heritage Center. (2008). *Operating Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. Intergovernmental Committee for The Protection of the World Cultural and Natural Heritage*. Paris: UNESCO World Heritage Center.